



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentang Mitos Ideologi Patriarki dalam film bukan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada representasi ideologi patriarki, sedangkan peneliti mencoba melihat ideologi patriarki secara lebih dalam dan spesifik.

Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai acuan referensi. Adapun penelitian tersebut adalah *Representasi Ideologi Patriarki dalam Film Sang Penari (Sebuah Kajian Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)* (2014) karya Putri Suryani, Universitas Multimedia Nusantara dan *Kekerasan terhadap Perempuan: Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden* (2010) karya Husninatul Ghassani, Universitas Diponegoro.

2.1.1 Representasi Ideologi Patriarki dalam Film Sang Penari (Sebuah Kajian Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)

Representasi Ideologi Patriarki dalam Film Sang Penari ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Pierce dalam mendeskripsikan tanda-tanda ideologi patriarki dan menggambarkan simbol-simbol yang terlihat tetapi juga dalam kata-kata yang menggambarkan objek-objek yang mengandung informasi dalam film tersebut.

Hasil penelitiannya adalah penulis meneliti bagaimana representasi bekerja dalam suatu film. Penulis memaknai suatu tanda dalam film sang penari. Penulis juga menjelaskan bagaimana konsep ideologi, ideologi gender, patriarki, kebudayaan jawa dan sebagainya.

Bagaimana tanda-tanda atau kode-kode sendiri dihubungkan dan diorganisir ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan gender sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidaksetaraan gender. Namun pada kenyataannya perbedaan gender melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi kaum perempuan.

Dalam masyarakat Dukuh Paruk berada dalam ideologi yang sudah di bentuk sejak dahulu. Dimana dalam ideologi masyarakat Dukuh Paruk nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang paling mencerminkan ketidaksetaraan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil.

Masyarakat Dukuh Paruk mengonstruksikan gender perempuan dan laki-laki berdasarkan biologisnya, tercermin dari pengonstruksian peran perempuan yang terdapat dalam scene Nyai Kartaredja menyebutkan peran ronggeng sebagai seorang perempuan. Scene inilah yang menjadi salah satu bukti perbedaan gender yang ada di Dukuh Paruk, selain itu penggunaan kata “matengin” pada scene istri yang mendukung suami

bercinta dengan ronggeng. Kata “matengin” merupakan salah satu contoh dari kekuatan bahasa yang menunjukkan kekuasaan laki-laki untuk membuahi perempuan.

Perempuan di Dukuh Paruk bukan hanya membiarkan ideologi patriarki yang tertanam di dalam keluarganya terus ada, tetapi juga mendukung tindakan-tindakan dari ideologi patriarki itu sendiri sehingga bisa terus hidup, berkembang dan tetap ada sampai sekarang.

Hal ini dapat di lihat dari salah satu scene dimana para perempuan di sawah yang memperebutkan suaminya untuk dapat memenangkan ritual bukak kelambu. Disini para perempuan bukan hanya merelakan suaminya untuk bercinta dengan ronggeng (perempuan lain), tetapi juga merelakan segala harta bendanya agar mendukung suaminya agar dapat memenangkan ritual bukak kelambu ini.

Perempuan-perempuan di Dukuh Paruk ini tidak merasa terlecehkan, tetapi malah merasa bangga apabila suaminya dapat bercinta dengan ronggeng, karena berarti suami mereka dianggap sebagai laki-laki yang perkasa, macho, dan mapan, serta diharapkan dapat memberikan berkah kepada istri dan keluarganya.

Para istri di Dukuh Paruk pun secara sadar atau tidak, merelakan kepentingan pribadinya untuk kepentingan suami, keluarga dan juga adat istiadat yang ada. Selain adegan tersebut ada juga adegan dimana para istri memberikan imbalan kepada Srintil atau Ronggeng atas ketersediaannya untuk bercinta dengan suaminya. Bahkan dalam kondisi kesulitan ekonomi

di Dukuh Paruk, dimana para suami harus menjadi kuli di sawah atau berjualan di pasar untuk memperoleh uang, para istri rela memberikan apa saja yang mereka punya agar Srintil bercinta dengan suami mereka.

Seperti dalam keseharian hidup di masyarakat Nampak muncul sebuah kebiasaan seks dalam ronggeng, kebudayaan pun mendukung hal tersebut, karena ronggeng dianggap memiliki kewajiban untuk melayani laki-laki setelah pertunjukkan tarian ronggeng berlangsung.

Sehingga disini terlihat bagaimana kontrol sosial kepada perempuan, khususnya kepada kultural dilakukan melalui produksi ketakutan dan ekspresi budaya dalam bentuk ritual. Di dalam film perempuan dengan konstruksi citra yang dibentuk oleh laki-laki, digambarkan memikat dan menjadi objek pemuas laki-laki.

2.1.2 Kekerasan terhadap Perempuan : Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden

Dalam film ini di tunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa berbagai macam bentuknya seperti: kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan dengan sewenang-wenang, kekerasan psikologis. Patriarkis disini dilandasi oleh kapitalisme dan menjadi latar belakang ideologi yang melatarbelakangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan budaya patriarki, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terdapat konstruksi gender tentang sikap laki-laki yang mendominasi

karena perannya yang berada sebagai subjek dan perempuan yang perannya sebagai objek.

Landasan berpikir perempuan sebagai objek yang akhirnya membuat perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapat kekerasan dari laki-laki. Dalam kapitalisme sendiri kekerasan terhadap perempuan di jalankan di bawah kekuasaan orang-orang yang mengendalikan sarana-sarana produksi dengan hubungan eksploitatif.

Film Jamila dan Sang Presiden pun menunjukkan adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh perempuan melalui tindakannya yang mencoba kabur dari para pelaku kekerasan dan juga membunuh para pelaku kekerasan. Namun perlawanan yang dilakukan ini menggunakan sudut pandang “pemenang” atau maskulin pada akhirnya menjadi perlawanan yang kandas karena adanya ketidakkonsistenan.

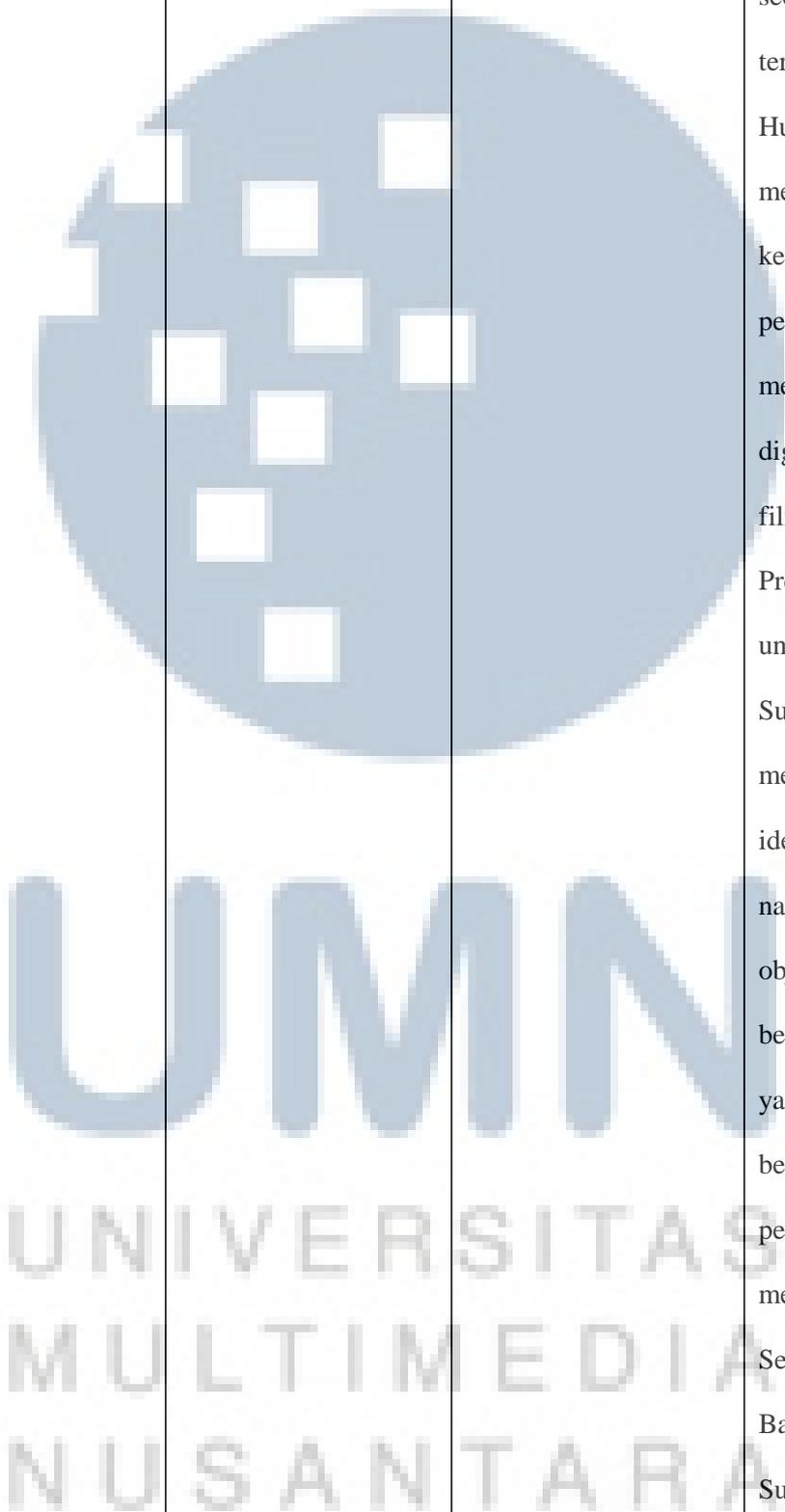
Ketidakkonsistenan terlihat dalam hal, pertama Jamila menyelesaikan masalah kekerasan juga dengan kekerasan. Kedua karena akhirnya Jamila menyerah dengan realita ketidakadilan yang bergantung pada dirinya. Ketiga, karena ia masih menjadi pribadi yang tidak mandiri, karena bergantung pada laki-laki yang berarti akhirnya Jamila berkompromi dengan budaya patriarki tersebut.

Tabel 2.1

Matriks Perbandingan Penelitian dengan Riset Terdahulu

No.	Konteks	Putri Suryani (Universitas Multimedia Nusantara)	Husninal Ghassani (Universitas Diponegoro)	E. M. C. Putri Prayitno (Universitas Multimedia Nusantara)
1	Judul	Representasi Ideologi Patriarki dalam Film Sang Penari (Kajian analisis Semiotika Charles Sanders Pierce) (2014)	Kekerasan terhadap Perempuan : Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden (2010)	Mitos Ideologi Patriarki terhadap Pembungkaman Perempuan dalam Film Jamila dan Sang Presiden (Analisis Semiotika Roland Barthes) (2016)
2	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan representasi tanda Ideologi Patriarki pada film Sang Penari. Memaknai representasi tanda Ideologi Patriarki pada film Sang Penari. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan representasi kekerasan terhadap perempuan dan membongkar ideologi tersembunyi perlawanan perempuan yang 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui bagaimana mitos Ideologi Patriarki terhadap pembungkaman perempuan dalam film Jamila dan Sang Presiden dengan pendekatan

			di konstruksikan melalui film Jamila dan Sang Presiden	semiotika Roland Barthes. 2. Mengetahui bagaimana film “Jamila dan Sang Presiden” merepresentasikan ideologi patriarki.
3	Metode Penelitian	Menggunakan Semiotika Charles Sanders Pierce.	Menggunakan Semiotika Roland Barthes.	Menggunakan Semiotika Roland Barthes.
4.	Perbedaan	Metode yang digunakan oleh penulis dan film yang diteliti oleh penulis berbeda dengan metode dan film yang digunakan oleh peneliti.	Perbedaannya adalah topik penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti.	Dalam penelitian oleh Putri Suryani, metode dan objek penelitian berbeda, sedangkan dengan Husninatul Ghassani yang berbeda adalah topik penelitian peneliti mengangkat tentang ideologi patriarki dalam pembungkaman perempuan

			<p>sedangkan penelitian terdahulu oleh Husninatul G. menggunakan kekerasan terhadap perempuan, meskipun objek yang digunakan sama yaitu film Jamila dan Sang Presiden. Sedangkan untuk penelitian Putri Suryani sama-sama membahas tentang ideologi patriarki namun menggunakan objek penelitian yang berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda karena peneliti menggunakan Semiotika Roland Barthes dan Putri Suryani menggunakan</p>
--	--	---	---

				Semiotika C. S. Pierce.
--	--	--	--	----------------------------

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Mitos

Mitos biasanya mengacu pada pikiran bahwa mitos itu keliru atau penggunaan kata mitos digunakan oleh orang yang tidak percaya. Namun Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang percaya dalam artinya yang orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam (Fiske, 1990, h.120-121).

Mitos merupakan sistem komunikasi yang berisikan pesan, namun tentu saja tidak semua sistem komunikasi merupakan mitos, membutuhkan kondisi khusus untuk menjadi pesan. Dalam pemahaman tentang mitos, tidak mungkin mitos menjadi objek, konsep atau ide namun kita menggambarkan mitos sebagai bentuk (Barthes, 1970, h. 109).

Mitos disini bukan berpikiran tentang baik dan buruk, atau hidup dan mati, atau manusia dan dewa. Tapi mitos disini lebih membahas tentang maskulinitas dan feminitas, tentang keluarga atau tentang keberhasilan, dll. Bagi Barthes mitos disini merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes seperti mata rantai dari konsep-konsep terkait (Fiske, 1990, h. 121).

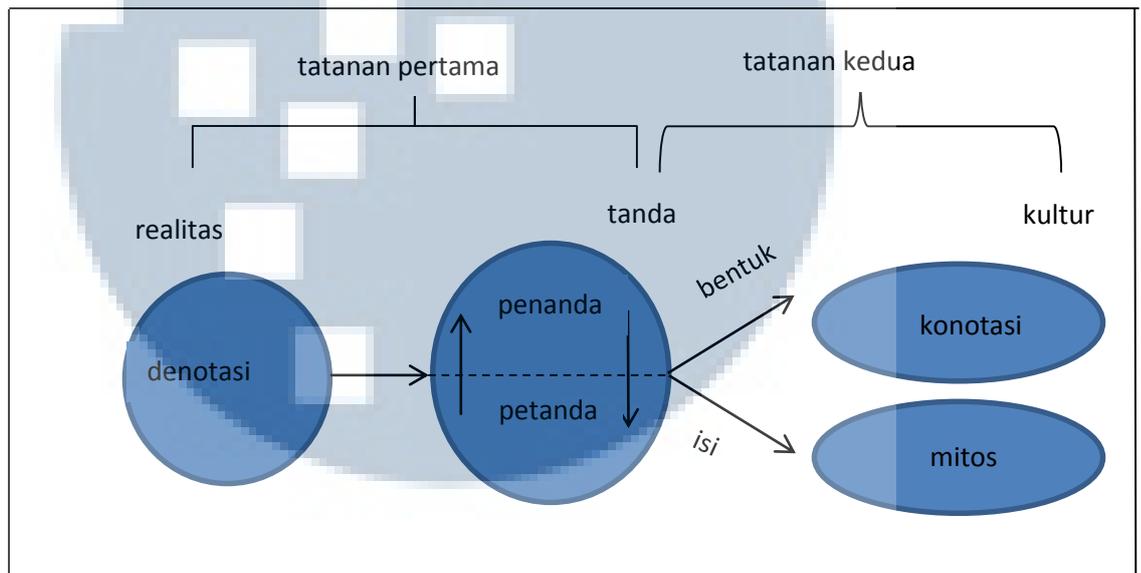
Mitos sendiri merupakan studi tentang jenis wacana, wacana yang dimaksud adalah sebuah objek bisa menjadi sebuah bahan wacana oleh mitos, namun bisa tiba-tiba wacana tersebut menghilang, wacana disini berkembang oleh manusia dan mengubah realitas yang ada kedalam wacana. Jadi wacana disini tidak ada yang bersifat abadi dan sama disegala tempat. wacana disini tidak berarti hanya sebatas pesan atau wacana, namun juga bisa berbentuk fotografi, film, pelaporan olahraga, acara, publikasi, yang penting semuanya dapat berfungsi dalam perkembangan wacana mitos (Barthes, 1970, h. 110-111).

Barthes sendiri menegaskan bahwa tatanan kerja pokok dari mitos adalah untuk menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukkan bahwa mitos sebenarnya merupakan produk kelas sosial yang mencapai dominasi melalui sejarah tertentu: maknanya, peredaran mitos tersebut mesti dengan membawa sejarahnya, namun pada penerapannya sebagai mitos membuatnya menyangkal hal tersebut, dan mencoba menunjukkan maknanya sebagai alami, dan bukan bersifat historis atau sosial. Mitos memistifikasi atau mengaburkan asal usulnya sehingga memiliki dimensi sosial atau politik. Para ahli mitologi mengungkap sejarah secara tersembunyi sehingga cara kerja sosial politik mitos adalah dengan melakukan demistifikasi mitos (Fiske, 1990, h. 122).

Gambar 2.1

Dua tatanan pertandaan Barthes.

Pada tatanan kedua, sistem tanda dari tatanan pertama di sisipkan kedalam sistem nilai budaya.



(Sumber : Fiske, 1990, h. 122)

Mitologi, karena merupakan ilmu yang mempelajari tentang mitos atau jenis wacana, hanya salah satu fragmen ilmu yang luas tentang tanda-tanda yang dituliskan oleh Saussure yaitu semiologi. Semiologi bukan berarti bisa menggambarkan semua jenis penelitian, namun setidaknya bisa memiliki konten yang sama dengan memenuhi fakta dan untuk menjelaskan isi atau latar belakang yang lain. Semiologi yang digambarkan oleh Barthes merupakan ilmu bentuk, karena studi signifikasi selain bentuk konten mereka namun juga hal-hal yang mendukung struktur. Hanya di totalitas dimana struktur dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Ilmu tentang bentuk bertentangan dengan prinsip-prinsip yang

diperlukan totalitas dan sejarah, namun semakin sistem secara khusus didefinisikan bentuknya, akan berujung pada kritik sejarah (Barthes, 1970, h.111-112).

Misalnya ada mitos bahwa perempuan “secara alami” lebih menjaga dan melindungi dibandingkan dengan pria, sehingga tempatnya yang alami adalah di rumah, membesarkan anak-anak setelah memperhatikan suaminya, padahal suaminya itu sama-sama “secara alami”, memainkan peran sebagai pencari nafkah. Peran-peran tersebut selanjutnya distrukturkan pada kebanyakan unit sosial alami keseluruhan keluarga. Mitos menyembunyikan asal usul sejarahnya, sambil menguniversalisasikannya, dan membuat mitos tersebut tak hanya tidak bisa diubah tapi juga cukup fair. Itu kelihatan sama-sama melayani kepentingan pria dan wanita dan menyembunyikan efek politiknya (Fiske, 1990, h. 122-123).

Mitos bisa sangat efektif menaturalisasikan makna dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek dari alam itu sendiri, kenyataan bahwa wanita melahirkan digunakan untuk menaturalisasikan makna perawatan dan domestik. Begitu juga dengan pria yang otot tubuhnya lebih besar dan berisi digunakan untuk menaturalisasikan kekuatan sosial dan politiknya. Keluarga menjadikan mitos tersebut menemukan posisi dominannya (dan karena statusnya yang alami) mendapatkan tantangan, sehingga para pemasang iklan dan produser media massa menemukan cara untuk memicu mitos gender yang baru dikembangkan guna

mengakomodasi wanita karier, orangtua tunggal, dan pria sesitif “baru”. Mitos-mitos tersebut tidak menyangkal yang lama secara keseluruhan, melainkan hanya membuang beberapa konsep dari mata rantainya, dan memberikan tambahan yang lain: mitos berubah secara evolusioner bukan secara revolusioner (Fiske, 1990, h.124).

Tak ada mitos yang universal pada suatu kebudayaan, yang ada adalah mitos yang dominan namun disitu juga ada yang kontra terhadap mitos tersebut. Mitos yang ditekankan oleh Barthes adalah dinamisnya, karena mitos dapat berubah dengan cepat dan beberapa diantaranya dapat berubah guna memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-nilai kultural dimana mitos itu sendiri menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Mitos merupakan cara pokok tanda-tanda berfungsi dalam tatanan kedua pertandaan, yakni tatanan tempat berlangsungnya interaksi antara tanda dan pengguna budaya yang sangat aktif (Fiske, 1990, h.125-126).

2.2.2 Ketidaksetaraan Gender

Gender merupakan istilah yang lekat dengan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya dimasyarakat. Peran yang dimaksud ini bukan dalam hal jenis kelamin atau biologis namun perannya secara feminitas dan maskulinitas di dalam masyarakat (Sunarto, 2009, h. 33).

Istilah gender biasanya dekat dengan istilah patriakisme, tingkat subordinasi wanita, kategori wanita dan implikasi dari determinisasi ideologis dari teori-teori feminis (Sunarto, 2009, h. 33).

Penindasan terhadap perempuan bukan hanya dapat dilihat dalam realitas adan penampakan materialnya, tapi juga dikonstruksikan secara ideologi dan wacana, suatu pandangan yang diambil untuk melihat posisi dan peran perempuan. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah seks atau jenis kelamin yang berbeda, tetapi ada juga konstruksi dalam pikiran mengenai realitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Hasan, 2011, h. 230).

Maksudnya istilah gender memang lekat dengan jenis kelamin. Namun jenis kelamin lebih mengarah kepada seks terkait dengan komponen biologis artinya berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis sesuai dengan keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan fakta biologis dari masing-masing jenis kelamin. Sedangkan untuk istilah gender sudah ada hasil dari sosialisasi dan ekulturasi seseorang dari konstruksi sosial, yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seorang yang dipelajari. Biasanya yang dipelajari berupa sikap yang pantas atau tidak tentang tubuhnya sebagai berjenis kelamin perempuan dan pantas atau tidak sebagai berjenis kelamin laki-laki. Hal ini yang membuat gender lekat dengan istilah feminitas bagi perempuan dan maskulinitas bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya (Ihromi, 2000, h. 4-5).

Feminitas dan maskulinitas merupakan konstruksi sosial. Seks merupakan biologis tubuh dan gender merupakan asumsi dan praktik budaya yang mengatur struktur sosial laki-laki dan perempuan dengan relasi sosialnya (Hasan, 2011, h. 254-255).

Dalam kehidupan sehari-hari perempuan lekat dengan pandangan sosok yang lemah lembut, kleibuan, emosional, anggun sehingga disebut sebagai feminim. Sedangkan laki-laki dikenal dengan sosok yang kuat, jantan, perkasa hingga disebut dengan maskulin. Sehingga hal ini sudah jelas bahwa gender bukan lah hal yang dibawa sejak lahir namun yang dipelajari dari lahir karena dibentuk dari proses sosial budaya yang sangat panjang (Hasan, 2011, h. 231).

Menurut World Health Organization (WHO) menggunakan kata gender untuk mengacu pada peran, tingkah laku, aktivitas dan sifat yang terbentuk secara sosial oleh masyarakat yang dianggap melekat begitu saja pada laki-laki dan perempuan (Hasan, 2011, h. 232).

1. Relasi gender bukan hanya menjelaskan tentang interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki tetapi juga mencakup suatu proses sosial yang kompleks, yang dibagi dalam 5 proses yang saling berinteraksi (Hasan, 2011, h. 233):
Konstruksi atas pembagian kerja berkaitan dengan gender.
2. Konstruksi atas simbol dan citra yang menjelaskan, mengekspresikan, menekankan, dan memaksa atau kadang-kadang bertentangan dengan pembagian kerja itu.
3. Interaksi antara perempuan dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan dan antara laki-laki dan laki-laki.

4. Proses yang membantu untuk menghasilkan komponen gender dari identitas individu yang meliputi kesadaran gender.
5. Proses fundamental secara terus menerus terhadap konstruksi dan konseptualisasi struktur sosial.

Sekarang ini terlihat bahwa banyak laki-laki yang mendominasi wilayah publik dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sebaliknya pembagian peran gender semacam ini tersebut telah menyebabkan berbagai masalah dan ketidakadilan gender bagi perempuan. Namun masalahnya ketidakadilan gender ini tidak menjadi masalah dan tidak dianggap aneh karena telah tersosialisasi dalam diri perempuan dan laki-laki sehingga menjadi sulit untuk dipisahkan secara jelas apa yang kodrat dan apa yang merupakan hasil belajar. Hal yang dipelajari pun selalu dianggap sebagai hal yang kodrati dan terciptalah sebuah sistem ketidakadilan gender yang kemudian diterima secara meluas, dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah (Ihromi, 2000, h. 5-7).

Kediksetaraan gender sendiri terwujud dari dua proses yang saling berhubungan yaitu institusional dan legitimasi. Institusional adalah proses dimana hubungan sosial menjadi bagian dari sebuah institusi. Kelompok dominan tidak hanya akan mencoba untuk mengakui adanya ketidaksetaraan, namun juga secara personal tidak merasa memiliki tanggung jawab ataupun merasa bersalah. Legitimasi adalah proses dimana ketidaksetaraan gender menjadi sebuah “kebenaran” maka dari itu seseorang akan merasa apa yang

dilakukannya adalah adil dan masuk akal. Ketidaksetaraan menjadi sesuatu yang diperbolehkan bahkan dapat ditolerir. Ketidaksetaraan ini bisa tidak terlihat atau tidak diketahui (Wharton, 2005, h. 221).

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu hasil dari patriarki, dimana permasalahan antara perempuan dan laki-laki bukan hanya sebatas jenis kelamin, melainkan juga menyangkut peran, fungsi, hak dan kewajiban perempuan maupun laki-laki. Patriarki secara langsung maupun tidak langsung menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki, hal ini yang memicu adanya ketidaksetaraan gender (Prabasmoro, 2006, h. 51-53).

2.2.3 Ideologi Patriarki

Patriarki secara umum sebagai pemahaman atas interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki yang memerlukan pemahaman secara mendalam. Patriarki sendiri bisa memiliki dua aspek yaitu dari sisi ideologi dan sistem (Hasan, 2011, h. 234).

Disinilah patriarki dapat dilihat sebagai mengarah kepada kekuasaan laki-laki atas perempuan, dimana laki-laki memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum, pranata sosial, dengan didukung oleh status superiornya. Pada awalnya patriarki digunakan pemerintahan dimana laki-laki digunakan untuk mengendalikan masyarakat, disitulah laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga hal ini semakin menunjukkan dominasi laki-laki sebagai pengontrol dalam rumah tangga dan keluarga terutama terhadap perempuan (Walby, 1990, h. 26-28).

Patriarki biasanya beranggapan bahwa perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas karena posisi mereka yang ditentukan oleh laki-laki yang hidup bersama mereka, baik suami, ayah, atau bahkan kakak laki-laki mereka. Posisi yang menekan perempuan ini disebabkan karena posisi laki-laki yang bertugas sebagai pencari nafkah dalam keluarga (Walby, 1990, h. 11-13).

Patriarki adalah ideologi yang mengacu pada perbedaan gender yang menganggap bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Terbentuk secara historis dari dinamika relasi dan organisasi sosial tempat laki-laki mendominasi perempuan, terbentuk secara historis, terjadi baik dalam dinamika relasi maupun organisasi sosial tempat laki-laki mendominasi perempuan. Sebagai ideologi, dapat diringkas bahwa patriarki adalah sebagai kekuasaan laki-laki, hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan (Hasan, 2011, h. 235).

Secara luas patriarki adalah sebagai suatu struktur sosial yang saling berhubungan dan disana laki-laki mengeksploitasi perempuan. Patriarki sebagai suatu ideologi disini sudah menyatu dengan kebudayaan manusia, dimana aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dimasyarakat dapat mengambil bentuk hubungan yang berbeda dalam setiap masyarakat. Disini laki-laki ditempatkan sebagai superordinat dari perempuan (Hasan, 2011, h. 236).

Patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat menempatkan kedudukan dan posisi lelaki lebih tinggi daripada perempuan

dalam segala aspek kehidupan, sosial, budaya dan ekonomi (Pinem, 2009, h. 42).

Adapun perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan patriarki dalam masyarakat. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan pandangan masyarakat yang memandang lemah perempuan (Millet, 2000, h. 27).

Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Namun masyarakat sendiri juga yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan baik secara pribadi, keluarga, masyarakat atau bahkan dalam bernegara. Masyarakat sendiri yang memiliki pandangan ini meneruskan secara turun temurun sehingga membentuk perbedaan perilaku, status, otoritas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki status di bawah laki-laki sehingga perempuan tidak berhak bertindak, melakukan kegiatan, mengambil keputusan berdasarkan kemauan sendiri. Pandangan ini pun didukung oleh nilai-nilai sosial, agama, hukum tersosialisasi secara turun menurun dari generasi ke generasi. Kecenderungan laki-laki dalam mendominasi, menyubordinasi dan melakukan dominasi atau kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya peran dan statusnya, baik dalam keluarga

maupun masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang berpusat pada laki-laki dan perempuan (Widianti, 2005, h. 213-214).

Ada enam struktur dasar dari patriarki menurut Walby (1990, h.20-21).

a. Patriarki dalam modal dan alat produksi

Patriarki dalam modal dan alat produksi merupakan struktur pertama yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam kehidupan rumah tangga diambil alih oleh suami atau laki-laki dewasa di rumah sedangkan peran istri atau perempuan adalah memproduksi (menghasilkan pekerjaan rumah, mengurus suami dan anak-anak).

b. Hubungan patriarki dalam pekerjaan

Hubungan patriarki dalam pekerjaan merupakan struktur patriarki kedua yang melihat hubungan ketidaksetaraan dalam konteks ekonomi. Perempuan dalam bekerja dianggap kurang terampil. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan akan memberikan dampak pada kedudukan dalam pekerjaan dan upah yang diterima. Karena tidak berpendidikan tinggi, berarti tidak memiliki keahlian dan ketrampilan. Tetapi ketika memiliki pendidikan tinggi, keahlian dan ketrampilan perempuan dianggap tetap berada di bawah laki-laki sehingga tidak dibayar dengan adil.

c. Hubungan patriarki dalam konteks kenegaraan

Hubungan patriarki dalam konteks kenegaraan, yaitu adanya kapitalis dan rasis dalam bagian pemerintahan.

d. Kekerasan dari laki-laki

Kekerasan merupakan perilaku rutin yang dialami oleh kebanyakan perempuan dari laki-laki dengan efek standar. Artinya kekerasan yang tidak membahayakan nasib perempuan. Perilaku ini bisa dimaafkan oleh negara dan tidak ada campur tangan negara, kecuali dalam kasus luar biasa, seperti pelecehan seksual, praktek pemerkosaan, pemukulan terhadap istri, dan lain-lain.

e. Hubungan patriarki dalam seksualitas

Hubungan patriarki dalam seksualitas dalam bentuk heteroseksualitas. Tetapi saat ini, perempuan telah diuntungkan karena adanya kontrasepsi modern, liberalisasi aborsi, dan perceraian dalam hukum.

f. Hubungan patriarki dalam institusi budaya

Hubungan patriarki dalam institusi budaya merupakan pandangan terhadap keterwakilan perempuan dalam patriarki di berbagai area, seperti agama, pendidikan, dan media. Dimana perempuan mengalami kerugian budaya jika menolak.

Institusi dasar dalam pembentukan patriarki merupakan keluarga, dalam keluarga ideologi patriarki terpelihara dengan baik dilingkungan masyarakat tradisional, maupun modern. Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga memberikan kontribusi besar dalam penguatan ideologi ini. Biasanya keluarga yang menganut ideologi patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak lelaki dari pada

perempuannya, oleh karena itu perempuan kesulitan mendapatkan akses informasi dan juga pekerjaan. Pekerjaan perempuan ada dua yaitu mengurus anak dan mengurus suami (Millet, 2000, h. 33).

Perbedaan sistematis terhadap perempuan disebabkan oleh struktur kemasyarakatan yang memberi kekuasaan lebih kepada kaum laki-laki, hingga mereka menjadi kepala keluarga yang mendominasi kaum perempuan (Sunarto, 2009, h. 33).

Menurut Walby (1990, h. 24), ada dua bentuk patriarki yang dijelaskan dalam tabel :

Tabel 2.2

Private and Public Patriarchy

<i>Form of Patriarchy</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>
<i>Dominant Structure</i>	<i>Household Production</i>	<i>Employment / State</i>
<i>Wider Patriachal Structure</i>	<i>Employment</i> <i>State</i> <i>Sexuality</i> <i>Violance</i> <i>Culture</i>	<i>Household Production</i> <i>Sexuality</i> <i>Violance</i> <i>Culture</i>
<i>Period</i>	<i>C19th</i>	<i>C20th</i>
<i>Mode of Expropriation</i>	<i>Individual</i>	<i>Collective</i>
<i>Patriachal Strategy</i>	<i>Exclusionary</i>	<i>Segregationist</i>

Patriarki domestik (*Private patriarchy*) adalah patriarki yang menekankan kesenjangan perempuan dalam rumah tangga. Dalam patriarki domestik yang menjadi struktur dominan adalah produksi rumah tangga. Keluarga cenderung bersifat eksklusif. Perempuan diambil alih oleh laki-laki secara individu. Perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga. Struktur dominan dari patriarki domestik ini bisa berdampak pada struktur lainnya, yaitu pekerjaan, negara, seksualitas, kekerasan, dan budaya. Sedangkan patriarki publik (*public patriarchy*) adalah patriarki yang melihat kesenjangan dalam hal umum, seperti pekerjaan dan negara. Dalam patriarki publik yang menjadi struktur dominan adalah pekerjaan dan negara. Patriarki ini menganggap perempuan berpangkat lebih rendah dan adanya pemisahan dengan perempuan. Perempuan akan mengalami kesenjangan di dalam sebuah negara. Tetapi berbeda dengan patriarki domestik, perempuan dalam bentuk patriarki ini akan mengalaminya secara berkelompok. Maksudnya, negara mengelompokkan perempuan dalam golongan yang kedudukannya tidak setara dengan laki-laki. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki berawal dari faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan, serta menyusui; semua kemampuan yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan kodrat dengan sebagai ibu. Manusia dilahirkan dengan berjenis kelamin perempuan digolongkan sebagai perempuan. Adanya sifat feminitas dalam diri perempuan bukan bawaan

sejak lahir melainkan hasil dari sosialisasi dengan lingkungan (Walby,1990, h. 25-26).

Dalam perkembangannya ideologi patriarki dilandasi oleh legitimasi-legitimasi yang merupakan bagian dari aturan-aturan yang berjalan di dalam suatu masyarakat merupakan sesuai dengan keinginan penguasa di masyarakat itu sendiri. Artinya ketika perempuan adalah anggota masyarakat yang sejajar dengan masyarakat laki-laki, diciptakanlah aturan-aturan sehingga tatanan kekuasaan itu tetap sesuai dengan ideologi yang mendasari keseluruhan struktur dalam masyarakat itu. Ideologi patriarki itu sendiri sangat mengedepankan kepentingan laki-laki, meninggikan nilai-nilai maskulin dan pada saat yang sama mengebekbelakangkan kepentingan perempuan dan merendahkan nilai-nilai feminim. Sehingga itu semua menyebabkan rendahnya penghargaan terhadap pekerjaan serta fungsi-fungsi domestik sampai pada tahap bahkan ketika perempuan berbagi beban publik dan beban ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, perempuan telah diwajibkan untuk melayani keluarganya. Hal ini terjadi karena perempuan di sektor publik dianggap semata-mata bersifat tambahan, sementara beban domestik tidak terbagi seolah-olah beban itu adalah domain khusus perempuan yang tidak seharusnya dimasuki laki-laki (Prabasmoro, 2006, h. 33)

Sosialisasi ideologi patriarki di bagi menjadi tiga kategori, yakni (Millet, 2000, h. 26):

1. *Temprament*

Pengelompokan kepribadian seseorang atas dasar kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Hal ini menimbulkan stereotip yang timbul di laki-laki adalah kuat cerdas, agresif merupakan sifat yang melekat pada laki-laki, sedangkan sebaliknya merupakan sifat yang melekat pada perempuan.

2. *Sex Role*

Komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gesture dan sikap pada setiap jenis kelamin sehingga terjadi pelekatan stereotip pada perempuan.

3. Status

Komponen politis dimana lelaki memiliki status superior dan perempuan *inferior*.

Ada juga beberapa bentuk ketidaksetaraan gender yang dikembangkan dan dilanggengkan dalam tatanan masyarakat patriaki adalah (Hasan, 2011, h. 235-236).

1. Marjinalisasi Perempuan

Lelaki dianggap superior dan perempuan berada di wilayah *inferior* (pinggiran, tidak lebih penting daripada lelaki), perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan di berbagai segi kehidupan perempuan; di tempat kerja (perbedaan upah antara lelaki dan perempuan), dalam rumah tangga (diskriminasi antar-anggota keluarga antara lelaki dan perempuan), bahkan dalam perlakuan negara (perbedaan perlakuan hukum).

2. Subordinasi

Terjadi akibat pandangan bias gender yang terjadi dalam segala bentuk yang berbeda, dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Anggapan bahwa perempuan tidak rasional dan lebih banyak bicara atas dasar perasaan daripada rasionalitas berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting, baik dalam perlakuan diskriminasi maupun kebijakan.

3. Stereotip

Labelisasi negatif terhadap perempuan, terutama dalam konteks hubungan sosialnya dengan lelaki hingga selalu menimbulkan kerugian pada perempuan. Perempuan dicap sebagai makhluk yang lemah, hingga cap ini membuat perempuan merasa tidak ada gunanya berperan lebih luas maupun meningkatkan kualitas

4. Kekerasan

Penyerangan (invasi) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis perempuan yang disebabkan oleh anggapan gender atau acap kali disebut *gender-relate-violance*. Kekerasan terjadi, baik dalam rumah tangga, tempat kerja, ranah publik, pemerkosaan di jalan, dan sebagainya.

5. Beban Kerja

Perempuan menanggung beban ganda (*double burden*) dalam dan luar rumah. Pembebanan pekerjaan kepada perempuan di area sekitar rumah cenderung dianggap tidak produktif dibandingkan

dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh lelaki. Pembebanan pekerjaan domestik, rendahan, dan tidak produktif seperti ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Penindasan terhadap perempuan bukan hanya dapat dilihat dalam realitas dan penampakan materialnya, tapi juga dikonstruksikan secara ide(ologi) dan wacana, suatu pandangan yang diambil untuk melihat posisi dan peran perempuan. Ketimpangan antara lelaki dan perempuan bukanlah masalah seks (jenis kelamin) yang berbeda, tapi juga ada konstruksi dalam pikiran mengenai realitas perempuan dalam kehidupan (Hasan, 2011, h. 230).

Ideologi patriarki sulit dihilangkan dari masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Perempuan memiliki stereotip yang melekat yaitu sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena tidak bisa mendapatkan uang dari hasil kerjanya mengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan, dianggap remeh dan menjadi kewajiban perempuan. Sehingga perempuan tidak perlu mendapatkan uang dari hasil kerjanya dan membuatnya selalu bergantung pada suami (Millet, 2000, h. 40).

Karena pandangan di atas, ideologi patriarki tidak dapat diruntuhkan karena secara ekonomi perempuan bergantung pada laki-laki. Ketergantungan itu terjadi dalam seluruh kehidupannya. Karena dalam masyarakat patriarki secara konvensional bekerja sistem seperti ini, bahwa laki-laki merupakan sumber pendapatan utama dalam keluarga, sedangkan perempuan merupakan pengurus rumah tangga di rumah. Perempuan tidak diizinkan mencari uang sendiri karena laki-laki menjadikannya sebagai properti atau 'aset' ketika

mereka sudah menikah dan berkeluarga. Hal ini pun terjadi karena pada permulaan dalam keluarga masing-masing anak laki-laki lebih diijinkan untuk menuntut pendidikan setinggi-tingginya dibandingkan dengan anak perempuan mereka. Anak perempuan kebanyakan hanya diminta untuk berada dirumah, sehingga anak perempuan semakin sulit untuk mendapatkan akses pengetahuan dan menambah kepintaran dan nilai lebih bagi mereka. Hal ini yang menyebabkan perempuan sangat sulit memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang besar untuk menafkahi dirinya, sehingga biasanya dalam pekerjaan di luar pendapatan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi demikian karena para orangtua berpikir, untuk apa menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi bila ujung-ujungnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga bila sudah menikah. Karena meskipun perempuan dan laki-laki memiliki dasar pendidikan yang sama, pada kodratnya perempuan juga tetap akan membagi pikirannya untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, dan mengurus suaminya di rumah (Millet, 2000, h. 40-42).

Struktur masyarakat yang menyebabkan para laki-laki merasa memiliki kekuasaan yang lebih dari perempuan sehingga dapat mendominasi perempuan, sehingga perempuan harus tetap setia dengan pekerjaan domestik meskipun sudah bekerja di luar. Namun mulai dari abad 19, pandangan tentang kekuasaan laki-laki atas perempuan bukan hanya pada pekerjaan domestik namun juga dikaitkan dengan daya tarik seksualnya terhadap kaum laki-laki, hal ini yang mengarahkan perempuan pada pornografi dan

perendahan kaum perempuan di mata laki-laki sehingga mendorong terjadinya kekerasan seksual (Sunarto, 2009, h. 33-40).

Seks mencakup berbagai bentuk reduksionisme biologis yang menyatakan bahwa struktur biokimia dan struktur genetis manusia menentukan perilaku lelaki dan perempuan dengan cara yang pasti atau khas. Sedangkan ada konstruksi sosial pada seks dan gender (Hasan, 2011, h. 254).

Pada abad ke 19 patriarki lebih beroperasi di ranah privat, biasanya seorang kepala keluarga, individual laki-laki sebagai kepala rumah tangga, mengendalikan perempuan secara individual dan secara langsung dalam ranah yang relatif yaitu privat di rumah. Hal ini terjadi karena laki-laki menindas perempuan yang berada di rumahnya, perempuan dicegah untuk masuk dalam ranah publik, di mana pekerjaan dan kegiatan politik berada. Yang terpenting bagi laki-laki adalah produksi rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Termasuk dalam hubungan seksual, kecenderungan laki-laki lebih memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, meskipun istrinya tidak mau. Namun pada abad ke 20, patriarki sudah beralih ke ranah publik, dimana perempuan sudah mempunyai akses baik pada arena publik maupun privat, perempuan tidak dilarang masuk dalam arena publik atau dikesampingkan, tetapi disubordinasikan di dalamnya. Perempuan cenderung dipisahkan dalam kelompok pekerjaan tertentu dan berupah rendah, serta mempunyai status yang lebih rendah daripada laki-laki. Disini perempuan mendapatkan eksploitasi yang lebih parah karena, dilakukan oleh laki-laki secara umum dan di ranah publik (Sunarto, 2009, h. 42).

Kontrol sosial terhadap perempuan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori (Sunarto, 2009, 43-44)

1. Normatif

Melalui pelabelan yang bersifat dikotomis antara pemberian predikat sebagai wanita baik dan wanita tidak baik.

2. Kultural

Melalui produksi ketakutan dengan ekspresi budaya populer dalam bentuk ritual penurunan martabat wanita melalui musik, literatur, film, televisi, iklan dan pornografi

3. Sosial

Berupa terjadinya peningkatan sosial yang berupa pemberian legitimasi dan dukungan sosial bagi siapapun yang merendahkan kaum wanita.

Kekerasan menurut Millet berhubungan erat dengan struktur masyarakat patriakis, dalam struktur ini masyarakat patriakis menggunakan kekerasan sebagai bentuk instrument utama dan digunakan laki-laki dalam pengontrolan perempuan untuk mendudukan kaum perempuan. Disini tokoh pelaku kekerasan bisa berupa sistem, nilai, norma, maupun prosedur teks (pengarang) yang memunculkan situasi tidak menyenangkan atau penderitaan tertentu dalam diri tokoh perempuan yang menjadi korbannya, biasanya diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, stereotip, viktimisasi, dominasi, domestikasi, objektivitas, eksploitasi, pornografi (seksplloitasi), opresi (Sunarto, 2009, h. 138-139)

Tabel 2.3

Indikasi Patriarki terhadap Perempuan

NO	MACAM	INDIKASI
1.	Diskriminasi	Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
2.	Marginalisasi	Pemiringan posisi wanita secara sosial dalam perolehan sumber daya ekonomi dan politik di ranah domestik dan publik.
3.	Subordinasi	Efek yang muncul akibat posisi dominan pria atas wanita yang diperoleh melalui kekerasan fisik, paksaan, kekerasan structural (dilakukan institusi sosial dan kekuatan ekonomi), dan kekerasan simbolik.
4.	Stereotip	Keyakinan dimana pria mempunyai sifat-sifat tertentu dan harus melakukan hal-hal tertentu dan wanita mempunyai sifat-sifat yang lain dan harus

		<p>melakukan hal-hal tertentu yang lain. Dalam masyarakat stereotip ini penting karena digunakan sebagai basis sikap dan perilaku anggota masyarakat satu sama lain. Stereotip peran jender ini dilanggengkan melalui mekanisme komunikasi antar pribadi dan di letakkan dalam struktur masyarakat melalui institusi-institusi semacam keluarga, agama, sistem pendidikan, sistem ekonomi dan sistem politik.</p>
5.	Viktimisasi	Perendahan wanita oleh pria sebagai bagian dari segregasi dan subordinasi.
6.	Dominasi	Kekuasaan satu kelompok atas kelompok lainnya atau atas individu lainnya.
7.	Domestikasi	<p>Pembiasaan, pemisahan, dan depolitasi perempuan. Domestikasi merupakan sebuah ideologi abad 19 yang menempatkan ranah rumah tangga sebagai tempat yang layak dan umum bagi kaum wanita. Sejarawan feminis menggambarkan sosok wanita domestik ideal sebagai religious/bermoral, suci/bersih, patuh dan menyerahkan energinya untuk memfungsikan harmonisasi dalam rumah tangga.</p>
8.	Objektivikasi	Pereduksian kaum wanita menjadi pasif dan objek jender (hasrat, eksploitasi, siksaan) daripada

		menampilkan wanita sebagai subjek manusia sepenuhnya.
9.	Opresi	Pengalaman seksisme sebagai bagian dari sistem dominasi.
10	Pornografi	Gambaran material seksual yang mendorong kekerasan dan paksaan perendahan seksual
11.	Eksplorasi	Penggunaan pengalaman, kekayaan atau keahlian orang lain tanpa penghargaan.

(Sumber : Sunarto, 2009, h. 138-139).

Bentuk patriarki khususnya kekerasan terhadap perempuan (Sunarto, 2009, h. 44-45) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh keluarga terhadap perempuan, berupa:
 - a. Penyerangan fisik (pembunuhan, penganiayaan, penyunatan, pengendalian alat reproduksi, pembunuhan terhadap bayi perempuan).
 - b. Penganiayaan seksual (pemerksaan, inses/ hubungan seks sedarah).
 - c. Penganiayaan mental (pengurangan, kawin paksa).
2. Kekerasan oleh masyarakat, berupa:
 - a. Adat dan tradisi (kekerasan terhadap alat reproduksi, penganiayaan, hukuman fisik, pengendalian/ pemaksaan terhadap alat reproduksi, sari, dan pemerksaan).

- b. Di tempat kerja (pelecehan seksual, intimidasi seksual, kekerasan yang diperdagangkan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa).
 - c. Media massa (pornografi, memperlakukan tubuh perempuan sebagai barang dagangan / komersialisasi).
3. Kekerasan oleh negara, berupa:
- a. Kekerasan politik berupa kebijakan negara, UU (penahanan tidak sah, sterilisasi/ pemandulan paksa, kehamilan paksa, kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan negara).
 - b. Kekerasan dalam tahanan (perkosaan, penyiksaan).

2.2.3.1 Ideologi Patriarki di Indonesia

Dalam sejarah negara, menggunakan konsep perempuan sebagai istri atau ibu atau keduanya menurut kebutuhan bangsa dan negara adalah hal yang biasa. Karena dalam pemerintahan perempuan pertama kali di kategorikan sebagai istri, hal ini lah yang membuat munculnya budaya ikut suami yang bertugas mengurus rumah tangga. Sedangkan tugas perempuan sebagai ibu merupakan kategori kedua. Hal ini dikarenakan dalam sebuah hierarki gender di negara ini kekuasaan negara menempatkan warga laki-laknya sebagai yang utama yang dikontrol oleh negara, lalu warga laki-laki akan mengontrol istrinya dan secara otomatis istri juga akan mengontrol anak-anaknya. Dengan cara ini

memudahkan negara mengotrol dan menciptakan kepatuhan pada satu jenis masyarakat yaitu masyarakat pancasila sebagai instrumen untuk melayani kepentingan negara (Sunarto, 2009, h. 161).

Di Indonesia perempuan dilekatkan dengan kodrat sebagai perempuan yang lemah lembut, tidak berbicara dengan suara keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas urusan suami dan orangtua, menjadi istri penurut dan anak perempuan yang patuh (Sunarto, 2009, h. 127).

Di sini perempuan diminta untuk kembali kekodratnya sebagai istri dan ibu yang terampil dalam ranah domestik (memasak makanan, merawat rumah, mengasuh anak, melayani suami, menyediakan kebutuhan keluarga). Dalam ranah publik di masyarakat pun negara menempatkan partisipasi perempuan sesuai dengan kodratnya misalnya dalam profesi guru, sekretaris, relawan, pramigari, dll yang dirasa sesuai dan tepat dalam eksistensinya dalam aktivitas domestik (Sunarto, 2009, h. 162).

Dalam UU Anti pornografi dan pornoaksi, bersifat misoginis, yaitu sikap membenci, menaklukan dan merepresi keberadaan budaya dan spiritualitas perempuan. UU ini menggunakan logika praktis, dimana logika tersebut menganggap nilai-nilai yang melekat pada laki-laki lebih baik dari pada perempuan dan karenanya mendominasi perempuan dan meletakkan dosa dan moral pada tubuh perempuan. Karena dikatakan “diperlukan adanya sikap, akhlak mulia, kepribadian luhur, pornografi

dan pornoaksi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat.” Dalam UU ini, seksualitas dan tubuh dianggap sebagai penyebab pornografi dan pornoaksi, sehingga akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan kehidupan masyarakat tidak akan terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan di kategorikan sebagai kotor (Sunarto, 2009, 133-134).

UU Antipornografi dan Pornoaksi tidak hanya menaruh kecurigaan terhadap perempuan namun juga memusuhinya, seolah tubuh perempuan kotor dan berbahaya. Sifat UU ini untuk mengatur perempuan, bukan berupaya menanggulangi pornografi. Maksudnya tujuan dari UU ini untuk melarang dan mengintimidasi perempuan bukan untuk menanggulangi perempuan (Sunarto, 2009, h. 135-136).

2.2.3.2 Seksualitas dan perempuan

Dalam patriarki ada istilah falosentisme dan jouissance. Falosentrisme berarti sebagai penggambaran tubuh dan seksualitas perempuan berdasarkan cara pandang laki-laki. Cara pandang laki-laki inilah yang disebut jouissance. Jouissance berarti pencitraan atas tubuh perempuan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Sebuah pandangan seksual perempuan sebagai penghayatan dan perayaan kemerdekaan tubuh. Falosentris juga menggambarkan tubuh perempuan berdasarkan keinginan laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan jouissance sebagai suatu konsep seksualitas perempuan yang dapat menjadi pembanding bagi definisi seksualitas (Junus, 2013, h. 27-28, 34-35).

Penggambaran seksualitas perempuan dalam falosentris, membentuk pemahaman, keinginan perempuan tentang seks sama dengan yang keinginan laki-laki. Akibatnya terjadi banyak pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan menjadi suatu tindakan kesamaan seksual. Jadi hal ini dianggap sebagai laki-laki melakukan tindakan kekerasan seksual karena memang perempuan membutuhkan dan menyukai tindakan kekerasan tersebut (Junus, 2013, h. 36).

Hal ini pun didukung oleh pemberitaan-pemberitaan di media, dimana kejadian pemerkosaan sebagai suatu fakta kejahatan, namun dengan pengerotisan peristiwanya, sehingga Nampak dari penggunaan kata ‘menggagahi’, menjantani, dll, memberikan kesan laki-laki pelaku pemerkosaan sebagai seseorang yang hebat. Sementara perempuan mejadi korban terpuruk dengan beragam komentar miring dari masyarakat. Dalam pemeriksaan di kantor polisi pun perempuan korban pemerkosaan diinterograsi tanpa empati bahkan cenderung disalahkan. Melalui cara berpakaian, kemolekan tubuhnya, gerak-geriknya yang menjadi pemicu dan penggoda laki-laki. Sementara menjadi suatu kewajaran bila laki-laki tergoda (Junus, 2013, h. 36-37).

Di Indonesia perempuan diajarkan sejak kecil untuk bersikap pasif, lembut, penurut, setia dan ‘malu-malu’ secara seksual. Perempuan yang dipandang baik secara norma masyarakat adalah perempuan yang tidak mengekspresikan aktivitas seksualnya dan menjaga keperawanan, cara berpakaian pun harus sopan, menutupi aurat, anggun dan feminim.

Sedangkan perempuan yang tidak baik adalah perempuan yang mengumbar aurat, terbuka, sexy, agresif, dan berani menggoda laki-laki secara seksual karena dianggap sebagai perempuan gampang karena bersedia melayani laki-laki mana saja. Istilah kasar untuk mengatakan perempuan seperti ini di Indonesia adalah cabo, pelacur, sundal, lonte, pecun, perek, jablay, dan WTS, istilah lebih halusny adalah perempuan 'nakal' dan dilihat sebagai ancaman oleh perempuan lainnya terhadap kehidupan pernikahan dan keluarga mereka, karena dianggap bisa menjerat para suami melakukan hubungan seks diluar nikah (Hidayana, 2013, h. 59-60).

Perempuan pun dipaksa untuk membendung dan mengontrol hasrat seksualnya karena harus mempertahankan keperawanan. Setiap gerak tubuh perempuan kerling mata, senyum, cara duduk, gerak pinggul dan sebagainya) selalu diawasi dengan ketat dan juga ditatap penuh nafsu birahi oleh laki-laki. Konstruksi seksualitas perempuan digambarkan dalam pornografi, perempuan pun mengalami subordinasi, degradasi, dehumanisasi karena kebutuhan mereka direduksi menjadi seks semata (Hidayana, 2013, h. 61).

Disini dijelaskan juga bahwa budaya seksual sudah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat seperti keperawanan, sunat perempuan, nikah siri, poligami, nikah usia dini atau prostitusi. Disini budaya seksual mengatur apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks seksualitas. Secara umum perempuan diharapkan dan

dituntut untuk masih perawan ketika menikah, dan laki-laki diharapkan sudah memiliki pengalaman. Kondisi budaya seksual ini lebih memihak pada salah satu gender (Hidayana, 2013, h. 62).

Seksualitas di luar pernikahan merupakan suatu tindakan seksualitas yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan norma yang berlaku. Nilai-nilai moralitas dan norma yang berlaku biasanya lebih berpihak pada kelompok dominan (kepentingan laki-laki), yang seringkali menempatkan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi. Jenis-jenis seksualitas di luar pernikahan yaitu perkosaan, prostitusi, perbuatan cabul, perzinahan, serta larangan hidup bersama (seks di luar nikah (Hidayana, dkk, 2004, h. 123-126).

- a. Perkosaan adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap seorang perempuan (yang bukan istrinya), dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Prostitusi termasuk di dalamnya adalah perempuan yang bermata pencaharian sebagai pekerja seks komersil (PSK) atau perdagangan perempuan. Pelacuran adalah bagian dari fenomena perdagangan perempuan yakni merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban kekerasan yang tidak saja dilestarikan melalui mekanisme mekanisme sosial yang ada, tetapi juga oleh mekanisme

mekanisme ekonomi yang menyebabkan bentuk kekerasan terhadap perempuan ini tetap lestari.

- c. Perbuatan cabul di dalam masyarakat disebut juga sebagai perbuatan tidak senonoh. Perbuatan cabul tidak ada unsur paksaan atau kekerasan tetapi melanggar kesusilaan. Berbeda dengan pelecehan seksual yang memiliki unsur paksaan atau kekerasan. Unsur penting pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah hal wajar, tetapi tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
- d. Penzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang salah satu pihak telah menikah. Persetubuhan dalam konteks ini adalah dalam hal yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
- e. Larangan hidup bersama atau seks di luar nikah dilakukan oleh orang-orang dewasa yang belum menikah dan tidak menginginkan pernikahan. Hubungan seksualitas macam ini merugikan kelompok perempuan.

Dalam penelitian ini seksualitas di luar pernikahan merupakan salah satu bagian yang paling banyak karena, Jamila sebagai tokoh utama merupakan seorang pekerja seks komersial, korban dari prostitusi, perkosaan, perbuatan cabul dan penzinahan. Bahkan Jamila dan Nurdin juga melakukan seks dan hidup bersama di luar nikah, sebelum akhirnya Jamila membunuh Nurdin. Oleh karena itu penulis mengangkat konsep ini, sebagai salah satu konsep yang relevan dengan penelitian.

2.2.4 Ideologi

Ideologi adalah pikiran terorganisasi berupa nilai-nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi serta membentuk perspektif ide yang diungkap melalui komunikasi dengan media teknologi (Adityawan, 2008, h. 29).

Ideologi juga bisa di kelompokkan menjadi tiga bagian (Adityawan, 2008, h.29):

1. Ideologi sebagai sistem kepercayaan yang merupakan karakteristik dari kelas atau kelompok tertentu : ideologi diartikan sebagai kumpulan ide (konsep yang di miliki bersama dalam kehidupan sehari-hari sebuah kelompok sosial. Ide-ide tersebut diatur dalam susunan tertentu. Dengan kata lain, ideologi adalah logika sejumlah ide yang dikomunikasikan dan dimaterialisasikan melalui sistem penandaan. Setiap sistem penandaan mencerminkan ideologi yang mendasarinya.

Kelompok sosial yang meyakini ide tersebut menerima dan memahami dunia luar dengan sikap relatif sama dan menetap.

Dalam pemahaman ini ideologi adalah sebuah sistem gagasan.

2. Ideologi sebagai sistem kepercayaan ilusioner dengan ide-ide atau kesadaran palsu yang dapat diperbandingkan dengan pengetahuan saintifik atau pengetahuan sesungguhnya. Ideologi merupakan hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensinya yang nyata. Dunia yang dibangun dari ideologi tidak sesuai dengan kenyataan, cenderung menyerupai ilusi. Hal tersebut disebabkan oleh apa yang direpresentasikan ideologi bukan kondisi eksistensi manusia melainkan hubungan manusia dengan kondisi itu. Dalam pemahaman tersebut, ideologi dimaksud sebagai sebuah sistem ilusioner.

3. Ideologi dipahami sebagai proses umum dari produksi makna dan ide melalui bahasa, bukan hanya bahasa verbal namun juga bahasa visual. Fungsi ideologi adalah mereproduksi hubungan produksi, hubungan di antara kelas, dan hubungan manusia dengan dunia, ideologi merupakan suatu praktik yang di dalamnya individu-individu dibentuk dan pembentukan ini sekaligus menentukan orientasi sosial mereka, agar mereka dapat bertindak dalam struktur ini dalam berbagai cara yang selaras dengan ideologi. Ideologi dalam pemahaman tersebut adalah sebuah proses pembentukan makna tempat lembaga-

lembaga dominan berfungsi membangun ideologi yang diinginkan.

Ideologi juga sebuah praktik yang mencakup sistem penandaan dalam seni, desain, dan kebudayaan, sepanjang kebudayaan itu dihasilkan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam situasi sosial historis tertentu sebagaimana aspek kesadaran dipengaruhi timbal balik oleh kondisi material. Oleh karena itu ideologi pihak tertentu atau kelas sosial dominan dapat dipahami dengan menafsir sistem makna yang diproduksi melalui sistem penandaan di dalam budaya masyarakat (Adityawan, 2008, h. 30-31).

Ideologi yang ditampakkan atau divisualisasikan disebut ideologi visual dan yang diekspresikan dalam bentuk artefak budaya senantiasa menunjukkan pola tertentu sebagai penanda. Pola dasar ideologi identic dengan gaya (*style*) itu dapat disebut sebagai ideologi visual; gaya adalah spesifik (*particular*) dari keseluruhan ideologi milik sebuah kelas sosial. Gaya yang dimaksud tidak hanya diperuntukkan bagi karya seni murni, tetapi juga artefak-artefak budaya seperti tulisan (literatur), pakaian, bangunan, dan desain. Gaya seni dan desain yang berpengaruh pada kurun waktu tertentu merupakan refleksi dari selera, pandangan, dan pemikiran kelompok sosial dominan (Adityawan, 2008, h. 31).

Ideologi sosial merupakan sebuah produk sosial bersifat dinamis dan rumit karena dipengaruhi faktor-faktor material dan ekonomi yang dimediasi oleh eksistensi dan komposisi kelompok-kelompok sosial serta hubungan diantaranya. Gaya sebagaimana ideologi visual juga memiliki makna;

membangkitkan konotasi dan asosiasi. Gaya adalah sebuah tanda Karena memiliki unsur isi dan bentuk (Adityawan, 2008, h. 31).

Dominasi ideologi visual sangat tergantung pada sistem citra, yang terdiri dari dua pokok: pertama, sistem ideasi yakni proses artikulasi lapisan-lapisan representasi ideologis. Kedua sistem mediasi yakni pemanfaatan teknologi komunikasi secara taktis sebagai distributor dari representasi itu. Sistem ideasi terdiri dari satuan representasi pembentukan ide (morferm) dengan bentuk organisasi internal kompleks (sintaksis) yang memberi kesan dan lebih menyukai interpretasi tertentu (semantic). Ideologi itu kemudian disebarluaskan atau direproduksi melalui sistem mediasi, baik media massa maupun interaksi sosial sehari-hari. Artinya, ideologi dengan sistem ideasi dan sistem mediasi optimal dapat menjadi dominan (Adityawan, 2008, h. 31-32).

Dalam Film Jamila dan Sang Presiden, terlihat bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara memiliki ideologi tentang patriarki yang dibenarkan dan dianut oleh masyarakatnya. Artinya ideologi patriarki disini menjadi dominan ketika Jamila sebagai seorang perempuan berusaha melawan norma dan ideologi yang ada. Jamila sendiri mendapat hukuman mati bukan hanya masalah karena membunuh seorang menteri, tetapi juga untuk mempertahankan ideologi yang berlaku, karena ideologi menyangkut banyak faktor lain seperti ekonomi, politik, dan lain-lain.

2.2.5 Perempuan dan Patriarki di Indonesia

Perempuan di Indonesia lekat dengan konsep peran perempuan sebagai istri atau ibu bahkan keduanya menurut kebutuhan bangsa dan negara. Melalui konsep ini pemerintah sudah mengisi pemikiran utama masyarakat dengan menciptakan budaya ikut suami, yang mengasosiasikan istri sama dengan pembantu rumah tangga. Meskipun menjadi ibu juga penting, tetapi peran menjadi ibu berada dalam kategori kedua setelah peran sebagai istri. Oleh karena itu pemerintah menerapkan sistem bahwa negara akan mengontrol warga laki-lakinya dan kemudian warga laki-laki akan mengontrol istrinya. Dan secara timbal balik istri juga akan mengontrol suaminya dan anak-anak mereka. Dengan cara ini pemerintah menempatkan perempuan sebagai salah satu alat untuk melayani kepentingan negara (Sunarto, 2009, h. 161).

Indonesia dalam era orde baru menggunakan cara ideologis berupa pengidolaan kualitas keibuan, peran tradisional perempuan dan perempuan sebagai pilar bangsa. Dalam konteks pembangunan di masa orde baru, setiap orang termasuk perempuan diharapkan untuk berpartisipasi di dalamnya (Sunarto, 2009, h. 161).

Dalam konteks pembangunan tersebut perempuan diminta untuk berpartisipasi, namun tidak melupakan kodrat sebagai istri dan ibu. Pesan semacam ini tentu kontradiktif karena menggunakan model pewanitaan (womenhood model) yang berbeda. Negara menggunakan model perempuan semacam ini sebagai sebuah konstruksi sosial yang diambil dari aspek paling

negatif dari ideologi gender borjuis dan priyayi. Konstruksi sosial itu dilakukan melalui penyebaran norma keluarga inti, pemisahan perempuan dalam program gender khusus dan pencitraan perempuan kelas menengah di media massa. Selain itu, negara juga mengondisikan organisasi-organisasi istri yang mencerminkan hierarki suaminya di pekerjaan yang mencerminkan pemahaman, keberadaan kaum perempuan ditentukan oleh kapasitas mereka dalam melayani suami, keluarga dan negaranya (Sunarto, 2009, h. 161-162).

Artinya negara tetap mengodisikan bahwa peran sosial ideal bagi kaum perempuan adalah sebagai istri dan ibu yang terampil dalam semua pekerjaan di ranah domestic (memasak makanan, merawat rumah, mengasuh anak, melayani suami, menyediakan kebutuhan keluarga dan lainnya). Partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di ranah publik juga harus relevan dengan pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga (sesuai dengan kodrat perempuan) (Sunarto, 2009, h. 162).

Pada tahun 1970-an sampai tahun 1980-an industri film Indonesia mengeluarkan beberapa hasil dari beberapa genre, salah satu film yang kontroversial adalah film perawan desa 1978 yang menceritakan tentang seorang perempuan desa dekat Jogjakarta yang menjadi korban perkosaan, namun kasus ini tidak pernah dibawa ke pengadilan bahkan tidak pernah ada publikasi tentang perkosaan ini, meskipun ada beberapa catatan pers tentang ini. Hal ini terjadi karena masih ada pembatasan berupa pengontrolan pesan dari film. Orde baru hanya mau film-film yang mendorong dan membantu

memberikan retorika tentang rezim-rezim orde baru itu sendiri (Sen & Hill, 2007, h. 146).

Film-film kontemporer tentang isu-isu sosial untuk membongkar metafora-metafora juga menjadi salah satu bagian yang disensor untuk ditayangkan pada saat orde baru (Sen & Hill, 2007, h. 146).

Film pada masa orde baru cukup membawa perubahan dalam bidang ekonomi media global dan juga menjadi salah satu alat politik media namun film menjadi salah satu produk propaganda dan pada saat itu film-film swasta mengalami banyak sensor yang dilakukan oleh pemerintah dan masih kurangnya dukungan kepada swasta, serta wadah perfilman yang semuanya masih terpusat di Jakarta menjadi hambatan dalam perkembangan perfilman Indonesia (Sen & Hill, 2007, h. 160).

Melalui film, orde baru juga menyatakan perempuan sebagai *konco wingking* yang bisa mengendalikan gerakan wanita Indonesia, karena tetap berada di bawah ideologi dan otoritan orde baru (Sunarto, 2009, h. 127).

Artinya pemerintahan orde baru dengan pendekatan militeristiknya telah mengondisikan perempuan Indonesia dalam ideologi “Ibu Bangsa” atau State Ibuism yang mengarah pada peran domestic kaum perempuan. Sebuah ideologi yang menekankan arti penting kaum perempuan untuk menjadi istri dan ibu serta menjauhkan diri dari politik bangsa (Sunarto, 2009, h. 127).

Dapat dijelaskan bahwa, jika pengiburumahtangaan (housewifistation) mempunyai implikasi ekonomi dan ibuisme (ibuism) mempunyai implikasi kultural, maka paham domestikasi mencakup lebih dari

keduanya. Domestikasi memiliki implikasi pada pembiasaan (*taming*), pemisahan (*segregation*) dan depolitisasi (*depolicisation*) kaum perempuan (Sunarto, 2009, h. 128).

2.2.6 Perempuan dan Patriarki dalam Media

Perempuan dalam media, baik melalui iklan atau berita senantiasa menggambarkan perempuan sangat tipikal yaitu, perempuan tempatnya di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria atau suami, tidak mampu membuat keputusan penting, menjalani profesi yang terbatas, selalu melihat pada dirinya sendiri, sebagai objek seksual/symbol seks (*pornographizing, sexploitation*), obyek fetish, obyek peneguhan pola kerja patriarki, obyek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersifat pasif, serta menjalankan fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan sebagai alat pembujuk. Eksistensi wanita pun tidak terwakili secara proporsional di media massa, baik dalam media hiburan maupun dalam berita (Sunarto, 2009, h. 4).

Dalam media sering dilekatkan stereotip laki-laki adalah sebagai pemimpin, agresif, ambisius, analitik, asertif, atletik, kompetitif, mempertahankan keyakinannya, dominan, kuat, mempunyai kemampuan kepemimpinan, bebas, *individualistic*, mudah membuat keputusan, maskulin, percaya diri, mandiri, kepribadian kuat, kemauan bertanggung jawab dan kemauan menanggung resiko. Dan perempuan lekat pula dengan stereotip berkarakter afeksi, gembira, suka anak, penuh kasih sayang, tidak

menggunakan bahasa kasar, mempunyai hasrat yang besar untuk menyejukkan perasaan yang terluka, feminim, dapat memuji, lemah lembut, mudah tertipu, cinta anak-anak, setia, sensitif pada kebutuhan orang lain, malu, bicara halus, simpatik, sabar, pengertian, hangat dan mengalah (Sunarto, 2009, h. 155-156).

Hal ini pun juga di benarkan oleh Deaux dalam (Sunarto, 2009, h. 156-157) yang menyatakan bahwa, atribut yang paling banyak dilekatkan dengan konsep pria adalah kuat, menyembunyikan perasaan, macho, seksi dan berotot. Sedangkan untuk wanitanya dilekatkan dengan, menarik, feminim, pintar, sensitif, emosional. Stereotip macam ini dapat ditemui hamper di semua media, seperti buku bergambar anak-anak, buku cerita, buku teks, film, televisi, Koran, majalah, bahkan buku fiksi.

Tidak jarang juga perempuan dipaksa untuk bisa menjadi *superwoman*, yang harus bisa mengurus kebutuhan rumah tangga sekaligus juga membantu suami untuk mencari tambahan pemasukan demi bisa menyeimbangkan aktivitaas di ranah domestik dan publik (Sunarto, 2009, h. 163).

Berita yang ada di media juga menyudutkan pihak perempuan. Kejadian pemerkosaan misalnya, tidak dinarasikan dan diberitakan sebagai suatu fakta kejahatannm tetapi dengan pengerotisan peristiwanya. Tampak dari pemilihan kata yang digunakan seperti ‘menggagahi’, menjantani, dan sebagainya. Memberikan kesan laki-laki pelaku pemerkosaan sebagai seorang yang hebat sementara perempuan yang menjadi korban tampil terpuruj

dengan beragam komentar miring dari masyarakat. Dalam pemeriksaan polisi dan intrograsi perempuan di perlakukan tanpa empati, bahkan cenderung disalahkan. Melalui cara berpakaian, kemolekan tubuhnya, gerak-geriknya menjadi pemicu atau menggoda laki-laki. Sementara laki-laki yang tergoda adalah suatu kewajaran (Junus, 2013, h. 36-37).

Cara pandang sebuah media terhadap perempuan merupakan cara pandang ideologi sebuah negara terhadap perempuan hal ini terlihat dari uraian tentang perempuan di media yang akhirnya menjadi tolak ukur masyarakat tentang perempuan, karena secara langsung dan tidak langsung media merupakan salah satu saluran dari penyampaian ideologi sebuah negara dan akhirnya akan di terima oleh masyarakat (Sunarto, 2009, h. 167).

2.2.7 Semiotika

Tanda-tanda atau signs adalah basis dari seluruh komunikasi. Manusia menggunakan perantara tanda-tanda dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. (Sobur, 2013, h. 15).

Ilmu yang mempelajari tanda-tanda tersebut adalah semiotika. Dapat di jabarkan bahwa semiotika dalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda, tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2013, h. 15).

Menurut Preminger dalam (Vera, 2014, h. 2) semiotika adalah ilmu tentang tanda. Ilmu yang menganggap fenomena sosial/masyarakat dan

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh teks telah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-kode budaya.

Menurut John Fiske dalam (Vera, 2014, h. 2) semiotika adalah studi tentang pertanda dan makna dari sistem tanda, ilmu tentang tanda, tentang bagaimana makna dibangun dalam 'teks' media atau studi tentang bagaimana tanda dari jenis karya apa pun dalam masyarakat yang mengkomunikasikan makna.

Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna (Hoed, 2011, h. 3)

Semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (*things*), memaknai (*to signify*) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (*to communicate*), memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2013, h. 15).

Karena suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda. Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas

berurusan dengan simbol, bahasa, wacana dan bentuk-bentuk non-verbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun (Sobur, 2013, h. 15-16).

Semiotika di kelompokkan menjadi tiga cabang ilmu tentang tanda (Vera, 2014, h. 4):

1. Semantics, yang mempelajari bagaimana sebuah tanda berkaitan dengan yang lain.
2. Syntactics, yang mempelajari bagaimana sebuah tanda memiliki arti dengan tanda yang lain.
3. Pragmatics, yang mempelajari bagaimana tanda digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan lingkup pembahasannya pun semiotika bisa dibedakan menjadi tiga (Vera, 2014, h. 4):

- a. Semiotika murni : membahas tentang dasar filosofis semiotika, yaitu berkaitan dengan metabahasa, dalam arti hakikat bahasa secara universal. Misalnya pembahasan tentang hakikat bahasa sebagaimana dikembangkan oleh Saussure dan Peirce.
- b. Semiotika Deskriptif : lingkup semiotika yang membahas tentang semiotika tertentu, misalnya sistem tanda tertentu atau bahasa tertentu secara deskriptif.
- c. Semiotika Terapan : lingkup semiotika yang membahas tentang penerapan semiotika pada bidang atau konteks tertentu,

misalnya dengan kaitannya dengan sistem tanda sosial, sastra, komunikasi, periklanan dan sebagainya.

Pemikir strukturalis dalam semiotika merujuk pada, Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa melihat tanda sebagai perteman antara bentuk (yang terdapat dalam kognisi seseorang) dan makna (atau isi, yakni yang dipahami oleh manusia pemakai tanda). Saussure menggunakan istilah *signifiant* (penanda) untuk segi bentuk suatu tanda dan menggunakan istilah *signifie* (petanda) untuk segi maknanya. Saussure dan para pengikutnya (antara lain Roland Barthes) melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam kognisi manusia (Hoed, 2011, h. 3-4).

Pandangan Saussurean pun di lanjutkan oleh Roland Barthes yang mempraktikkan model Saussurean dan juga model *linguistic*, ia berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu (Sobur, 2013, h. 63).

Dalam proses penelitiannya Barthes pernah menggunakan studi penelitian menggunakan kode rasionalisasi yang merupakan suatu proses yang mirip yang terlihat dalam retorika tentang tanda dan mode, dan di dalamnya ada lima kode yang ditinjau Barthes yaitu: kode hermeneutik (kode teka-teki), kode semik (kode makna konotatif), kode simbolik, kode proaretik (logika tindakan) dan kode gnomik (kode kultural) (Sobur, 2013, h. 65-66).

Hal lain yang membedakan Barthes, saat sistem pemaknaan tanda, Barthes menggunakan sistem pemaknaan tanda dua tingkat, yaitu: sistem

pertama disebut denotatif (makna sebenarnya) dan sistem kedua disebut konotatif (hasil dari pemaknaan pembaca) (Sobur, 2013, h. 68-69).

Pada dasarnya ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian secara umum dengan pengertian yang di mengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum denotasi, dimengerti sebagai makna harafiah atau makna yang sesungguhnya atau bahkan kadangkala juga digunakan sebagai referensi atau acuan. Menurut Barthes denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama dan konotasi adalah tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan, dengan demikian sensor atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrem melawan keharafihan denotasi yang bersifat opresif, Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi semata-mata. Penolakan ini terasa berlebihan namun berguna sebagai sebuah koreksi atas kepercayaan bahwa makna “harafiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Sobur, 2013, h. 70-71).

Dalam perkembangan semiotika, muncul perkembangan teori John Fiske. Fiske pun mengatakan bahwa semiotika dapat dikelompokkan menjadi tiga studi utama yaitu (Fiske, 1990, h. 60):

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terjadi atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya.

2. Kode dan sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya.
3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekeja. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri.

Menurut Fiske, kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi atau film saling berhubungan sehingga membentuk sebuah makna. Kode-kode tersebut telah diencode oleh kode-kode sosial yang terbagi atas tiga level, yaitu level realitas (*level reality*), level representasi (*level representation*), dan level ideologi (*level ideology*). Ini merupakan tahap-tahap dalam pencarian representasi (Vera, 2014, h. 35).

2.2.8 Semiotika Roland Barthes

Semiologi menurut Barthes adalah mempelajari tentang bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai di sini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan, memaknai di sini berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Barthes melihat signifikasi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi tak terbatas pada

bahasa, tetapi juga ada hal-hal lain di luar bahasa. Barthes menganggap kehidupan sosial sebagai sebuah signifikasi. Dengan kata lain, kehidupan sosial, apa pun bentuknya, merupakan suatu sistem tanda tersendiri (Vera, 2014, h. 26-27).

Bahasa menurut Barthes adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu (Sobur, 2013, h. 63).

Ada dua konsep yang dikembangkan oleh Barthes yang relevan dalam kaitan semiotik, pertama adalah konsep hubungan sintagmatik dan paradigmatis, dan yang kedua adalah konsep denotasi dan konotasi (Vera, 2014, h. 11).

Barthes juga meyakini bahwa hubungan antara penanda dan pertanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbitrer. Bila Saussure hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu mitos yang menandai suatu penandaan (Vera, 2014, h. 27)

Gambar 2.2

Peta Tanda Roland Barthes

Signifier(Penanda)	Signified(Petanda)
Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
Connotative Signifier (Penanda Konotatif)	Connotative Signified (Petanda Konotatif)
Connotative Sign (Tanda Konotatif)	

(Sumber: Vera, 2014, h. 27)

Dari peta tanda Barthes diatas dapat terlihat bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan pertanda, namun tanda denotatif sekaligus juga menjadi penanda konotatif. Denotatif dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya memiliki keterbukaan makna, atau makna implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya terbuka kemungkinan-kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sedangkan konotasi sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi dapat dikatakan merupakan makna objektif yang tetap sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi (Vera, 2014, h, 28).

Oleh karena itu konotasi bekerja pada tingkat subjektif, sehingga kehadirannya tidak disadari, mudah sekali orang menganggap makna konotatif sebagai fakta denotatif (Sobur, 2004, h. 128).

Pada signifikasi bentuk kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tetnang realitas dan gejala alam. Mitos disini merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Mitos juga merupakan suatu wahana dimana suatu ideologi terwujud, mitos dapat terangkai menjadi mitologi yang memainkan peran penting dalam kesatuan-kesatuan budaya. Dalam penelitian untuk memahami sebuah ideologis kita

terlebih dahulu harus mempelajari mitos. Mitos adalah suatu wahana dimana suatu ideologi terwujud, mitos dapat terangkai menjadi mitologi yang memainkan peranan penting dalam kesatuan-kesatuan budaya. Dalam penelitian dapat ditemukan ideologi sebuah teks dengan meneliti konotasi-konotasinya. Salah satu cara adalah mencari mitologi dalam teks-teks. Ideologi adalah sesuatu yang abstrak. Mitologi adalah kesatuan mitos-mitos yang koheren, menyajikan inkarnasi makna-makna yang mempunyai wadah dalam ideologi. Ideologi harus dapat diceritakan. Cerita itulah mitos (Sobur, 2004, h. 128-129).

Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebut dengan mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi yaitu penanda, pertanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu sistem yang unik mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tatanan kedua. Di dalam mitos pula, sebuah pertanda dapat memiliki beberapa penanda (Vera, 2014, h. 28).

Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan konsep mitos dalam arti umum. Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan. Dakan uraiannya, Barthes mengemukakan bahwa mitos dalam pengertian khusus ini merupakan perkembangan dari konotasi, konotasi yang sudah terbentuk lama

di masyarakat itulah mitos. Barthes juga mengatakan bahwa mitos merupakan sistem semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia (Hoed, 2011, h. 59).

Mitos dapat dikatakan sebagai produk kelas sosial yang sudah memiliki suatu dominasi, mitos menurut Barthes sebagai *type of speech* (gaya bicara) seseorang. Ciri-ciri mitos Roland Barthes (Vera, 2014, h. 29):

a. Deformatif

Barthes menerapkan unsur-unsur Saussure menjadi form (*signifier*) dan concept (*signified*). Ia menambahkan *signification* inilah yang menjadi mitos yang mendistorsi makna sehingga tidak lagi mengacu pada realita yang sebenarnya. Pada mitos, form dan concept harus dinyatakan. Mitos tidak disembunyikan, mitos berfungsi mendistorsi bukan untuk menghilangkan. Dengan demikian, form dikembangkan melalui konteks linear pada bahasa atau multidimensi pada gambar. Distorsi hanya mungkin terjadi apabila makna mitos sudah terkandung dalam form.

b. Intensional

Mitos merupakan salah satu jenis wacana yang dinyatakan secara internasional. Mitos berakar dari konsep historis. Pembacalah yang harus menemukan mitos tersebut.

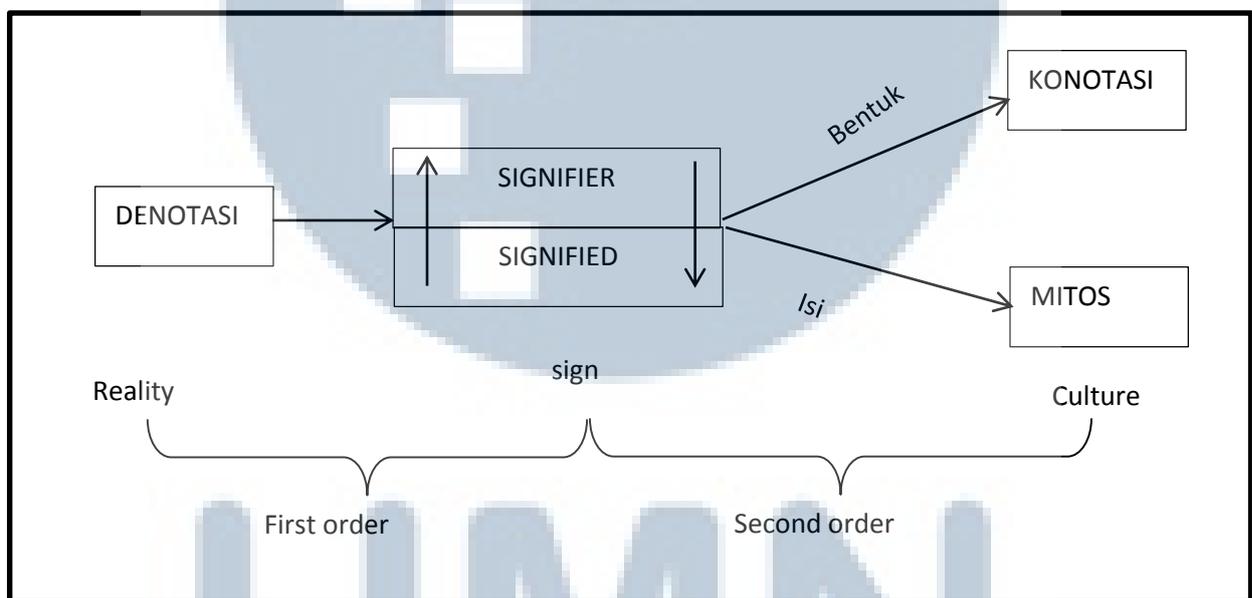
c. Motivasi

Bahasa bersifat arbiter, tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, misalnya melalui afiksasi, terbentuklah kata-kata turunan.

Sebaliknya, makna mitos tidak arbitrer, selalu ada motivasi dan analogi. Penafsir dapat menyeleksi motivasi dari beberapa kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas analogi, antara makna dan bentuk. Analogi ini bukan sesuatu yang alami, tetapi bersifat hist

Gambar 2.3

Rumusan tentang signifikasi dan mitos Roland Barthes



(Sumber : Fiske, 1990, h. 122)

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified yang disebut denotasi yaitu makna sebenarnya dari tanda. Sedangkan signifikasi tahap kedua digunakan istilah konotasi, yaitu makna yang subjektif atau paling tidak intersubjektif, yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos merupakan lapisan pertanda dan makna yang paling dalam (Vera, 2014, h. 30).

Berikut penjelasan Budiman (2004, h. 55-57) dan Vera (2014, h. 30-31) tentang teori signifikasi dua tahap dan mitologi, serta penjelasan Barthes dalam mengemukakan lima kode leksia dalam suatu teks :

a. Kode Hermeneutik

Adalah satuan-satuan yang dengan berbagai cara berfungsi untuk mengartikulasikan suatu persoalan, penyelesaiannya, serta aneka peristiwa yang dapat memformulasi persoalan tersebut atau justru menunda penyelesaiannya, atau bahkan yang menyusun semacam teka teki (enigma) dan sekedar memberi isyarat bagi penyelesaiannya. Pada dasarnya kode ini adalah sebuah kode “pencitraan” yang dengannya sebuah narasi dapat mempertajam permasalahan menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum memberikan pemecahan atau jawaban. Di bawah kode hermeneutic orang akan mendaftar beragam (formal) yang berupa sebuah teka-teki (enigma) dapat dibedakan, didugam diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disikapi. Kode ini disebut pula sebagai suara kebenaran (*the voice of truth*).

b. Kode Semik

Kode semik atau konotasi adalah kode yang memanfaatkan isyarat, petunjuk, atau “kilasan makna” yang ditimbulkan oleh penanda-penanda tertentu. Merupakan sebuah kode relasi penghubung yang merupakan konotasi dari orang, tempat, objek yang pertandanya adalah sebuah karakter (sifat, atribut, predikat).

c. Kode Simbolik

Merupakan kode “pengelompokan/’ atau konfigurasi yang gampang dikenali karena kemunculannya yang berulang-ulang serta teratur melalui berbagai cara dan sarana tekstual. Tema merupakan sesuatu yang bersifat tidak stabil dan tema ini dapat di tentukan dan beragam bentuknya sesuai dengan pendekatan sudut pandang (perspektif) pendekatan yang dipergunakan. Kode ini memberikan dasar bagi struktur simbolik.

d. Kode Proairetik

Merupakan kode tindakan “action”. Kode ini didasarkan atas konsep proairesis, yakni kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari suatu tindakan secara rasional. Yang mengimplikasikan suatu logika perilaku manusia: tindakan-tindakan membuahkan dampak-dampak dan masing-masing dampak memiliki nama *generic* tersendiri semacam “judul” bagi sekuens yang bersangkutan. Proairetik juga merupakan tindakan naratif dasar yang tindakan-tindakannya dapat terjadi dalam berbagai sekuen yang mungkin diindikasikan. Kode ini disebut pula sebagai suara empiris.

e. Kode Budaya

Kode ini berwujud semacam suara kolektif yang anonym dan otoritatif, bersumber dari pengalaman manusia, yang mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya sebagai pengetahuan atau kearifan(wisdom) yang terus menerus dirujuk oleh

teks, atau yang menyediakan semacam dasar otoritas moral dan ilmiah bagi suatu wacana. Kode ini sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga ilmu pengetahuan. Biasanya orang mengindikasikan kepada tipe pengetahuan (fisika, fisiologi, psikologi, sejarah, termasuk arsitektur), dan mencoba mengkonstruksikan sebuah budaya yang berlangsung pada satu kurun waktu tertentu yang berusaha untuk diekspresikan. Kode ini disebut pula sebagai suara ilmu.

2.2.9 Film

Film menurut UU No. 23 tahun 2009 merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (Trianton, 2013, h. 1).

Film merupakan salah satu media komunikasi massa, karena menggunakan saluran media dalam berkomunikasi atau dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berarti berjumlah banyak, tersebar dimana-mana, khlayaknya heterogen dan *anonym*, dan menampilkan efek tertentu. Film dan televisi memiliki kesamaan, dalam sifatnya yang audio visual tetapi dalam proses penyampaian pada khalayak dan proses produksinya agak sedikit berbeda (Vera, 2014, h. 91).

Secara umum, film merupakan media penyampaian warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan berfungsi sebagai alat

huburan, sumber informasi, alat pendidikan dan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa (Trianton, 2013, h. 3).

Karakteristik film sendiri adalah (Vera, 2014, h. 92):

1. Layar yang luas, kelebihan film dibandingkan televisi adalah layar yang digunakan untuk pemutaran film lebih berukuran besar atau luas, sehingga memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan-adegan yang disajikan dalam film.
2. Pengambilan gambar, dengan layar yang luas maka teknik pengambilan gambarnya pun dapat dilakukan atau dapat memungkinkan dari jarak jauh atau *extreme long shot* dan *panoramic shot*, karena cara pengambilan ini dapat memunculkan kesan *artistic* dan suasana yang sesungguhnya.
3. Konsentrasi penuh, biasanya film diputar didalam bioskop dengan ruangan kedap suara, maka pada saat kita menonton film, kita akan fokus pada alur cerita yang ada di dalam film tersebut, tanpa ada gangguan dari luar.
4. Identifikasi Psikologis, konsentrasi penuh saat menonton dapat membuat kita benar-benar menghayati apa yang ada di dalam film tersebut, hal ini membuat kita secara tidak sadar menyamakan diri kita sebagai salah seorang pemeran dalam film tersebut.

Unsur-unsur utama dalam film yaitu unsur audio visual, dimana audio visual tersebut dikategorikan dalam dua hal yaitu unsur naratif (penceritaan

bahan atau materi) dan unsur sinematik (bagaimana cara mengolah penceritaan dari bahan atau materi). Sedangkan unsur sinematik dalam film adalah *mise en scene* (segala sesuatu yang berhubungan dengan di depan layar), sinematografi (sudut pandang dari kamera, jarak pandang kamera, gerakan kamera), editing (proses penggabungan adegan dari tempat yang berbeda-beda sehingga menjadi satu jalan cerita) dan suara (membuat adegan menjadi lebih hidup dan membantu penonton menginterpretasikan suara tersebut dalam bayangan visual, sehingga bisa mengekspektasi adegan dari sound yang dikeluarkan) (Vera, 2014, h. 92).

Ada empat komponen utama dalam *mise en scene* dalam film yaitu setting (dalam hal ini ada setting atau latar yang asli ada pula yang dibuat manusia agar semakin terlihat asli didukung juga dengan properti), tata cahaya (*lighting*) (bersifat membangun *mood* penonton dan memberikan *point* perhatian penonton kepada sesuatu yang detail), *make-up* kostum dan tatanan rambut (memberikan kesan akan karakter serta memperlihatkan genre film tersebut) dan yang terakhir adalah acting dan pergerakan pemain (berupa tindakan, ekspresi, sikap atau aksi yang dilakukan oleh aktor menjadi *point* dalam menyampaikan isi cerita dari film) (Vera, 2014, h. 92-93).

Dari empat komponen utama *mise-en-scene* tersebut akan diteliti secara lebih mendalam tentang arti dari komponen-komponen tersebut dalam sebuah adegan yang mengandung patriarki.

2.2.10 Semiotika Film

Film sekarang ini dinilai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif karena mengandung unsur audio dan visual. Hal ini membuat film sangat mudah menjangkau segmen sosial dan memiliki potensi dalam mempengaruhi khalayak (Sobur, 2013, h. 126-127).

Bentuk film dalam masyarakat selalu dipahami secara linear, film mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (*message*) di baliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya, karena film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat, film merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar (Sobur, 2013, h. 127)

Seiring perkembangannya, film pun mulai melahirkan berbagai macam unsur komunikasi massa, karena banyak film yang lahir karena mengumbar seks, kriminal dan kekerasan (Sobur, 2013, h. 127).

Film sebagai representasi realitas masyarakat bukan sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas tersebut, tetapi film membenruk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur, 2013, h. 128).

Film dibangun dari banyak tanda, tanda-tanda tersebut disusun dan bekerja sama dengan baik untuk mencaapai efek yang di harapkan. Yang paling penting dalam film adalah gamabar dan suara, kata yang diucapkan ditambah dengan suara-suara yang lain serentak mengiringi gambar-gambar. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam film menciptakan

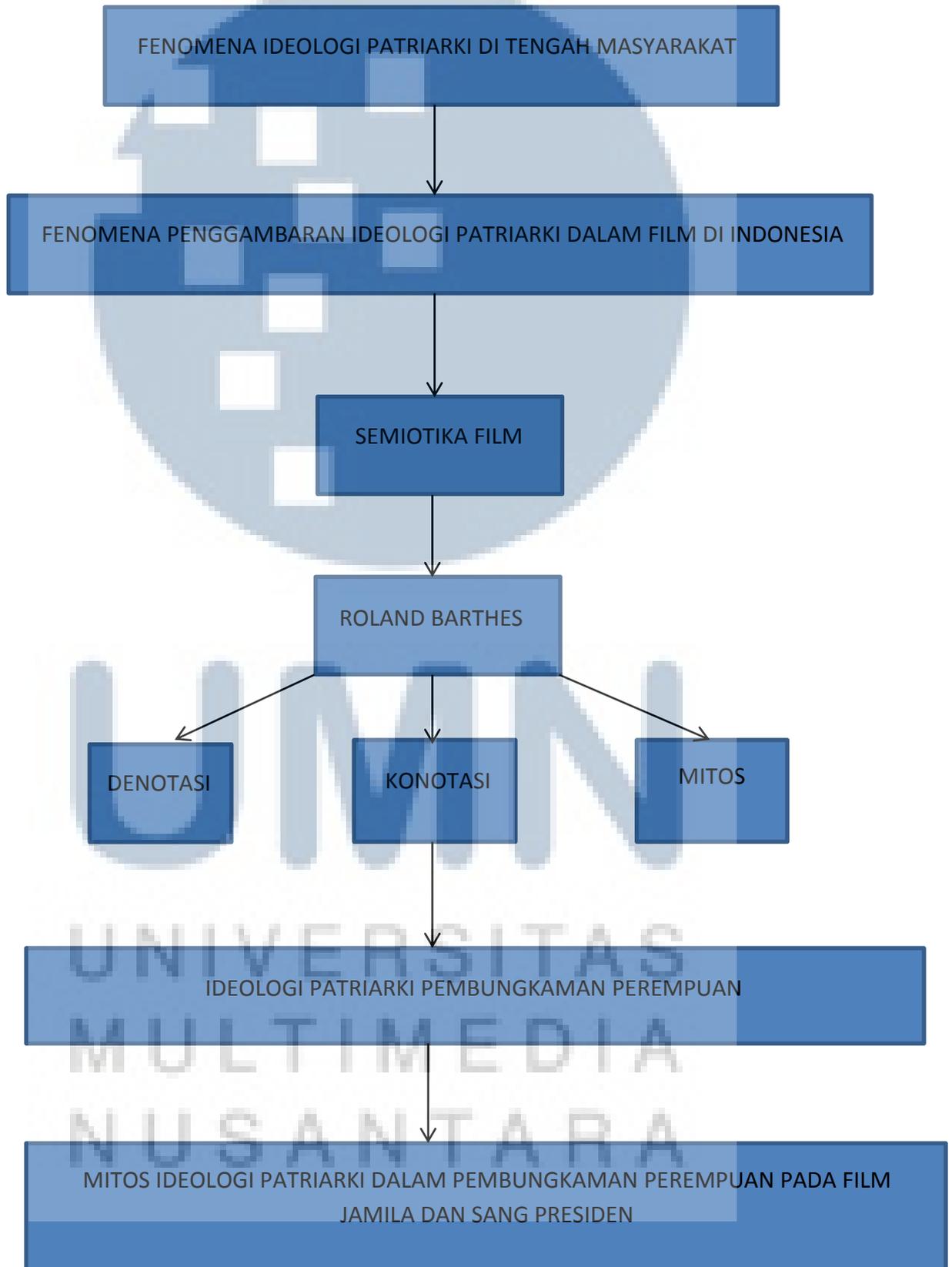
imaji dan sistem penandaan oleh karena itu dalam film digunakan tanda-tanda ikonis (tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu) (Sobur, 2013, h. 127-129).

Film menggunakan cara khusus dalam menyampaikan pesannya (cara pembuatannya dengan kamera, dan medium penyampaiannya dengan proyektor dan layar). Film juga memiliki sintaksis dan tata bahasa yang berbeda, yang akrab dengan pemotongan (*cut*), pengambilan gambar jarak dekat (*close up*), pengambilan gambar jarak jauh (*long shot*), pembesaran gambar (*zoom in*), pengecilan gambar (*zoom out*), memudar (*fade*), pelarutan (*dissolve*), gerakan lambat (*slow motion*), gerakan yang di percepat (*speeded up*), efek khusus (*special effect*) (Sobur, 2013, h. 130-131).

Semiotika disini berguna untuk menguraikan tanda-tanda ikonis tersebut karena film biasanya melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan linguistik untuk mengodekan pesan yang ingin disampaikan (Sobur, 2013, h. 131).



2.3 Kerangka Pemikiran



Peneliti pertama melihat fenomena-fenomena ideologi patriarki yang ada di tengah masyarakat, lalu peneliti melihat bahwa topik tentang ideologi patriarki masih relevan di masyarakat. Lebih lanjut peneliti melihat dan memahami penggambaran ideologi patriarki dalam film di Indonesia khususnya Jamila dan Sang Presiden.

Lebih lanjut peneliti melihat film Jamila dan Sang Presiden yang mengandung ideologi patriarki tersebut dari sisi semiotika film, dan peneliti menguraikan tanda-tanda ikonis dalam adegan mana saja dari film Jamila dan Sang Presiden yang mengandung unsur patriarki. Lalu peneliti menganalisis adegan-adegan dalam film tersebut menggunakan semiotika Roland Barthes yang berawal dari denotasi, konotasi dan berakhir pada mitos ideologi patriarki tersebut. Peneliti menghubungkan juga dalam analisis antara ideologi patriarki dan pembungkaman perempuan. Akhirnya ditemukan mitos ideologi patriarki dalam pembungkaman perempuan pada film Jamila dan Sang Presiden.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA